



KAJIAN SOSIAL EKONOMI PEKERJA TAMBANG SIRTU DI DESA KROMPENG KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN

Suhadi✉

Prodi Pendidikan IPS, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juni 2012
Disetujui Juli 2012
Dipublikasikan November
2012

Keywords:
Livelihood
Sirtu mines
Socio-economics

Abstrak

Penelitian bertujuan mengkaji aspek sosial ekonomi pekerja tambang sirtu. Data penelitian diambil dari para pekerja tambang sirtu, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pejabat terkait; dengan menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan (1) faktor beralihnya mata pencaharian berasal dari dalam dan dari luar masyarakat (2) status dan peran sosial sama seperti anggota masyarakat lain yang tidak bekerja sebagai penambang sirtu (3) para pekerja tambang sirtu sangat kompeten dalam pekerjaannya dan pendapatan dapat memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan buruh tani (4) peran pemerintah daerah hanya berupa sosialisasi peraturan dan pelarangan tanpa tindak lanjut. Disarankan agar diciptakan lapangan kerja baru sebagai diferensiasi sebagai solusi yang tidak merugikan penambang.

Abstract

This study aims to assess the socio-economic aspects of coal miners sirtu. Source of research data is "sirtu" mine workers, villager, community leaders, and officials; by using interview and observation. Analysis of the data used the interactive model of qualitative data analysis. The results showed (1) the factor that affect the livelihood of the shift in the form internal and external community (2) the status and social roles are as same as the other community members who doesn't work as a sirtu miner (3) the miners sirtu is very competent at his job and revenue to meet the needs of everyday life (4) the role of local governments only to socializing the rules and restrictions without any follow-up. It is suggested to create a new jobs field as a differentiation as solutions that not harm miners.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Kampus Unnes Bendan Ngisor, Semarang 50223
E-mail: jurnalpps@unnes.ac.id

ISSN 2252 - 6390

Pendahuluan

Bagi petani yang hidup dalam keadaan serba kekurangan, sebagai akibat dari sering-mengalami kegagalan dalam produksi pertanian membuat petani mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan daripada keuntungan jangka panjang. Sempitnya lapangan kerja bidang pertanian dan keahlian lain yang dimilikinya tidak ada menyebabkan peralihan mata pencaharian ke bidang nonpertanian terbatas. Sebagai upaya mengutamakan keselamatan agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Usaha apa saja dilakukan asalkan mendatangkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang makin mendesak.

Desa Krompeng merupakan desa yang dilewati oleh sungai Kupang yang menyimpan potensi air, pasir, batu, dan sedimentasi. Pekerjaan penggalian sirtu bukanlah pekerjaan yang diminati pada mulanya karena membutuhkan kemampuan fisik prima dan permintaan sirtu belum banyak sehingga hanya dilakukan oleh penduduk yang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Setelah dibuat jalan tembus menuju lokasi penambangan di sungai, keadaan berubah. Menambang sirtu di sungai mulai ditinggalkan dan merambah lahan sawah di pinggir sungai. Selanjutnya, lahan-lahan sawah dipinggir sungai Kupang lambat laun tidak lagi ditanami padi tetapi berubah menjadi lahan penambangan galian sirtu untuk bahan bangunan.

Pekerjaan galian sirtu menjadi diminati setelah tampak bahwa para pekerja galian sirtu memiliki kehidupan yang baik. Di antaranya dibuktikan dengan banyak yang mampu membangun rumah permanen berdinding batu bata serta memiliki pendapatan harian yang jelas dibandingkan dengan yang bekerja sebagai buruh pertanian. Bekerja sebagai pekerja galian sirtu kemudian dipandang sebagai alternatif yang lebih baik bagi penduduk yang tidak memiliki keterampilan karena penghasilannya dapat menutup kebutuhan fisiologis.

Peneliti memilih lokasi Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan karena tambang galian sirtu di desa ini memiliki karakteristik khusus. Di antaranya (1) terjadi perpindahan mata pencaharian, (2) terdapat kelompok sosial baru, (3) merupakan penambangan rakyat yang tidak memiliki ijin dan tidak ada kegiatan penambangan oleh perusahaan yang berijin, dan (4) upaya pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan untuk menutup kegiatan penambangan sirtu tidak diindahkan.

Penelitian ini difokuskan pada faktor-fak-

tor yang mempengaruhi petani yang beralih mata pencaharian menjadi pekerja tambang galian sirtu dan peran pemerintah daerah dalam kegiatan penambangan sirtu. Kajian aspek ekonomi difokuskan pada penelitian kompetensi kerja dan perolehan pendapatan tenaga kerja. Kajian aspek sosial difokuskan hanya pada penelitian status sosial dan peranan sosial.

Masyarakat Desa menurut Bintarto (dalam Daldjoeni, 1987: 45) merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat disitu (suatu daerah) dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Wiradi, masalah tanah di pedesaan merupakan masalah yang rumit karena menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, demografi, hukum, politik, sosial, agronomi dan ekologi sehingga pendekatannya perlu dilakukan dari berbagai sudut pandang (dalam Tjondronegoro, 1984: 286). Selanjutnya, Clifford Geertz menyatakan terjadi involusi pertanian secara terus menerus sejak masa penjajahan dan mestinya sampai masa sekarang khususnya di Jawa dan Bali. (dalam Tukidi, 2001: 21). Meskipun berbagai peraturan telah dikeluarkan namun konversi lahan pertanian ke nonpertanian terus berlangsung. Akibatnya, lahan dijual, disewakan atau fungsinya dialihkan ke nonpertanian.

Bahan galian sirtu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah golongan C yang termasuk dalam Bahan Galian Industri (BGI) kelompok IV. Berkaitan dengan endapan batuan residu dan endapan letakan, meliputi lempung, pasir kuarsa, kelompok kalsedon, kuarsa kristal, dan sirtu.

Para petani beralih mata pencaharian ke nonpertanian karena pertanian dan hasilnya tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidup apalagi kesejahteraan. Mata pencaharian nonpertanian yang tersedia sesuai potensi desa adalah penambangan sirtu. Dalam proses perubahan sosial akan terdapat kelompok yang mendukung dan menolak perubahan sesuai dengan kepentingannya. Pengaruh perubahan sosial dan bebannya bagi tiap individu berbeda sehingga dampaknya juga berbeda.

Seseorang yang memutuskan untuk bekerja pada suatu bidang tertentu sudah pasti telah mempertimbangkan masak-masak terhadap pilihannya. Padagilirannya akan berpengaruh terhadap statusnya dalam masyarakat, minimal status dalam bidang ekonomi tidak dianggap sebagai keluarga yang perlu dikasihani. Lebih lanjut, seseorang yang bekerja akan mendapat status dan berperan yang lebih dalam masyarakat dan mendapat posisi da-

lamkelompoknya yang menjadi tujuan dari individu dalam masyarakat.

Perubahan sosial akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang ada dalam masyarakat yang kemudian akan menciptakan ketidakseimbangan dan selanjutnya akan menuju pada suatu keseimbangan baru. Fungsi baru dapat merupakan sesuatu yang konsekuensinya dikehendaki atau justru sebaliknya sebagai sistem yang mencederai masyarakat.

Tenagakerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (UU No. 13 Tahun 2003). Angkatan kerja (*labor force*) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi (BPS, 1983).

Pertanyaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah "bagaimana aspek sosial dan ekonomi pekerja tambang sirtu di Desa Krompeng". Tujuan penelitian (1) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi beralihnya petani menjadi pekerja tambang galian sirtu, (2) mengkaji kompetensi kerja dan perolehan pendapatan tenaga kerja pada penambang galian sirtu, (3) mengkaji status sosial dan peran sosial pekerja tambang galian sirtu, dan (4) mengkaji peran pemerintah daerah dalam kegiatan penambangan galian sirtu.

Metode

Lokasi penelitian di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari subyek penelitian, yaitu para pekerja tambang galian sirtu, dan informan. Data sekunder berasal dokumen atau sumber kepustakaan yang sesuai seperti data Kecamatan Talun Dalam Angka, Surat Penghentian Penambangan dari Dinas PSDA ESDM dan laporan tindak lanjut dari petugas kecamatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat bantu pengumpul datanya adalah (1) pedoman pengamatan; (2) pedoman wawancara baik wawancara mendalam maupun wawancara dalam kelompok terfokus; (3) kamera; (4) tape recorder; dan (5) catatan-catatan lapangan.

Selain wawancara mendalam secara *face to face* dilakukan pula wawancara kelompok terfokus (FGI) dengan peserta terdiri atas semua komponen yang terlibat dalam penelitian sesuai fokus penelitian. Pengamatan intensif dilakukan peneliti pada bulan Maret hingga April 2012. Dokumen penting yang berhubungan dengan fokus penelitian diperoleh dari Kantor Dinas PSDA ESDM Kabupaten Pekalongan dan Kantor Kecamatan Talun. Untuk menjamin pencapaian kredibilitas, peneliti melakukan teknik triangulasi.

Analisis data menggunakan metode interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Miles, 1992) yaitu melakukan aktivitas analisis data yang meliputi kegiatan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusion drawing/verificaton*).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengumpulan data di lapangan, sebagian masyarakat melakukan alih pekerjaan menjadi penambang sirtu di sebabkan oleh beberapa factor yaitu factor dari dalam masyarakat dan facto dari luar masyarakat. Beberapa factor dari luar masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) tidak memiliki lahan sawah; (2) memiliki lahan sawah yang sangat sempit; (3) hasil pendapatan sebagai petani/buruh tani yang tidak mencukupi kebutuhan; (4) peluang kerja sebagai buruh tani atau buruh lainnya yang tidak jelas dan tidak menentu; (5) pendidikan yang rendah; (6) tidak dimilikinya keterampilan; (7) tidak memiliki modal yang cukup untuk berusaha; (8) lebih suka berkumpul dengan keluarga; (9) bebas dalam bekerja; (10) terdapatnya potensi sirtu di sungai dan lahan sawah, dan; (11) pendapatan yang cukup dan dapat diandalkan sebagai penambang sirtu.

Sementara faktor dari luar yang mempengaruhi alih pekerjaan adalah; (1) Faktor dari luar masyarakat yang mempengaruhi alih pekerjaan menjadi penambang sirtu di antaranya (2) pembeli sirtu yang setiap hari selalu ada; (3) kontak dengan masyarakat lain yang memiliki kegiatan penambangan sirtu; (4) peraturan ijin penambangan galian C yang tidak jelas, dan; (5) ketidakmampuan pemerintah daerah beserta aparatnya dalam menangani penambangan galian C tidak berizin.

Kedua faktor tersebut di atas, bila dianalisis secara mendalam bisa dipahami. Hal ini karena anggota masyarakat tidak semuanya memiliki lahan sawah, kalau pun masih memilikinya luasnya tidak seberapa. Bagi yang tidak memiliki sawah atau kebun tentu tidak punya pilihan lain lagi se-

lain menjadi buruh, baik pertanian atau nonpertanian. Petani memilih menggunakan tenaganya sendiri. Akibatnya, buruh tani lebih banyak menganggur. Wiradi yang menyatakan bahwa untuk semua lapisan masyarakat pedesaan, pendapatan yang berasal dari usaha nonpertanian merupakan tambahan pendapatan yang sangat penting.

Disamping itu, apabila dilihat dari perspektif kepemilikan lahan sawah di sempadan sungai, daripada ditanam padati tetapi hasilnya sering mengecewakan maka terdapatnya potensi sirtu lahan sawahnya merupakan pilihan untuk dimanfaatkan untuk diambil sirtunya karena harganya tinggi. Selesai ditambang lahan sawah tetap jadi miliknya dan bisa direklamasi. Pendidikan juga menjadi cukup berpengaruh. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan keterampilan yang dimilikinya sangat terbatas dan menyebabkan keterbatasan peluang memasuki jenis pekerjaan yang tersedia. Ketiadaan modal juga merupakan alasan klasik yang diberikan.

Masyarakat pedesaan dikategorikan sebagai masyarakat yang masih hidup melalui pemikiran pedesaan dan dapat dipahami bila lebih suka berkumpul dengan keluarga dan memilih pekerjaan yang bebas sebagai salah satu karakteristik kehidupan pedesaan. Keterikatan pada lingkungan keluarga masih mendominasi pemikiran.

Ditinjau dari teori perubahan sosial maka adopsi unsur-unsur kebudayaan sesuai dengan konsep dinamika sosial August Comte. Di antara faktor penentu kadar perubahan menurut Horton adalah lingkungan fisik dan kebutuhan yang dianggap perlu. Kebutuhan untuk bekerja agar memperoleh pendapatan adalah nyata sehingga merupakan perubahan yang diterima dan didukung karena memberikan keuntungan. Setiap rumah tangga pasti terdorong untuk mencari alternatif mata pencaharian sesuai perubahan kondisi sosio-ekonomi dan lingkungan lokal seperti dikemukakan oleh Giannecchini.

Untuk menjadi pekerja sirtu, para pekerja memiliki kompetensi beberapa kompetensi yang harus dimiliki adalah (1) berangkat setiap hari, kecuali Jumat dengan berjalan kaki; (2) bekerja mulai pukul 06.00 hingga 17.00 dan beristirahat di lokasi bagi penambangan sirtu lahan sawah Sigong, sedang lokasi lain beristirahat di rumah; (3) rata-rata bekerja dalam bentuk kelompok antara 2-4 orang; (4) semua pekerja tambang memiliki peralatan menambang sirtu; (5) pengetahuan dan keterampilan khusus tidak diperlukan untuk menjadi pekerja tambang sirtu, kecuali pembuatan *batu belah*; (6) pekerja tambang sirtu yang menambang pasir di sungai bebas dalam melakukan penambangan sedang penambang sirtu di lahan

sawah dibawah koordinasi mandor; (7) tempat beristirahat dibuat seadanya oleh para pekerja tambang; (8) kehadiran pembeli/sopir merupakan pembangkit semangat kerja; (9) sangat jarang terjadi kecelakaan, walaupun ada bukan kecelakaan yang serius; dan (10) terjalin kerjasama dan keharmonisan di antarapara penambang sirtu.

Pekerja sirtu setiap hari berangkat kerja kecuali Jumat sehingga dapat disebut pekerja harian. Bekerja secara kelompok atau sendiri mulai pukul 06.00 hingga 17.00 dan beristirahat sekitar pukul 11.30-12.30, bekerja selama kira-kira 10 jam. Para pekerja sirtu sebagian memilih beristirahat di lokasi penambangan dengan membuat tempat berteduh seadanya. Pengetahuan dan keterampilan khusus tidak diperlukan untuk menjadi pekerja tambang sirtu, kecuali pembuatan *batu belah*.

Pekerja tambang sirtu yang menambang pasir di sungai bebas dalam melakukan penambangan sedang penambang sirtu di lahan sawah di bawah koordinasi mandor. Lahan sawah yang ditambang merupakan lahan sewaan, kesepakatan kerja sebagai bentuk keseimbangan antara penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) dan permintaan akan tenaga kerja (*demand for labor*), yaitu "maro". Artinya, jumlah nominal uang yang diperoleh dari penjualan sirtu oleh penambang dibagi dua.

Kehadiran pembeli/sopir merupakan pembangkit semangat kerja para penambang sirtu. Selama kegiatan penambangan sirtu sangat jarang terjadi kecelakaan. Kalau pun ada bukan kecelakaan yang serius. Dapat diartikan bahwa para penambang sirtu telah melakukan pekerjaannya secara profesional. Terjalin kerjasama dan keharmonisan di antara para penambang sirtu dapat dijelaskan sebagai perwujudan kehidupan pedesaan karena semua pekerja sirtu berasal dari pedesaan dan sebagian besar merupakan penduduk Desa Krompeng sendiri.

Dari perspektif pendapatan, pendapatan kerja para penambang sirtu umumnya di antaranya (1) pekerja tambang sirtu perempuan yang bekerja sendirian menambang di sungai memperoleh Rp. 15.000-30.000 per hari; (2) pekerja tambang sirtu laki-laki yang bekerja sendirian menambang di sungai memperoleh Rp. 30.000-45.000 per hari; (3) pekerja tambang sirtu di lahan sawah Sigong memperoleh pembagian pendapatan Rp. 40.000-60.000 per hari; (4) mandor tambang sirtu pendapatannya Rp. 75.000 per hari; dan (5) juragan tambang sirtu diperkirakan pendapatannya sekitar Rp. 6.000.000-7.500.000 per bulan.

Pendapatan penambang di sungai per hari antara Rp. 15.000-45.000 per hari sela-

ma sekitar 5-7,5 jam kerja, di lahan sawah Rp. 40.000-60.000 per hari, bekerja selama sekitar 8 jam. Mandor tambang sirtu pendapatannya Rp. 75.000 per hari. Pendapatan juragan tambang sirtu diperkirakan sekitar Rp. 6.000.000-7.500.000 per bulan. Perbedaan pendapatan yang diperoleh para pekerja tambang sirtu tidak terlepas dari kompetensi kerjanya. Kemampuan fisik menjadi faktor utamanya. Dalam penambangan sirtu dikenal istilah musim "ramai" sekitar bulan April-Desember dan musim "sepi" sekitar bulan Januari-Maret.

Status sosial para pekerja tambang sirtu di antaranya (1) berumur antara 15-55 tahun; (2) seluruhnya beragama Islam; (3) mayoritas merupakan suami dan kepala keluarga; (4) pekerja perempuan berstatus istri atau janda; (5) para pekerja tambang sirtu sama status sosialnya atau derajatnya seperti anggota masyarakat lain di Desa Krompeng pada umumnya; (6) di antara para pekerja tambang sirtu merasa senasih sebagai buruh; dan (7) pekerjaan menambang sirtu merupakan bentuk diferensiasi pekerjaan.

Peran sosial para pekerja tambang sirtu di antaranya (1) tidak menjadi beban orang lain atau keluarga karena menganggur; (2) bekerja karena termasuk dalam usia produktif (15-55 tahun); (3) mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya; (4) memanfaatkan peluang pekerjaan yang ada untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan; dan (5) selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti anggota masyarakat lain di Desa Krompeng pada umumnya.

Para pekerja tambang sirtu sama status sosialnya atau derajatnya seperti anggota masyarakat lain di Desa Krompeng pada umumnya. Status bawaan (*ascribed status*) yang disandang adalah orang desa yang lahir dari keluarga petani atau buruh tani. Status capaian atau yang diperjuangkan (*achieved status*) adalah menjadi orang kaya yang bermartabat tidak hanya sekedar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kesamaan status sosial ini menunjukkan bahwa pekerjaan tambang sirtu merupakan suatu bentuk diferensiasi sosial dan bukan stratifikasi sosial. Di antara para pekerja tambang sirtu merasa senasih sebagai buruh pekerja kasar.

Dengan bekerja maka tidak menjadi beban orang lain atau keluarga karena menganggur. Sebuah peran mendasar mengingat rata-rata statusnya adalah suami dan kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah dirinya dan keluarganya merupakan sebuah konstruksi sosial yang berlaku umum. Agak berbeda dengan para perempuan yang ikut bekerja menambang sirtu

baik bersama suaminya maupun bekerja sendirian sebagai kesetaraan gender.

Peran sosial para pekerja tambang sirtu juga tidak berbeda dengan anggota masyarakat lainnya. Selain bekerja untuk mendapatkan uang agar kebutuhan sehari-hari dapat dicukupi, semua kegiatan yang ada di dalam masyarakat diikuti. Seperti kegiatan pengajian, tahlilan, bersih kubur, rukun kematian, air bersih, dan kegiatan lainnya.

Peran pemerintah di antaranya (1) pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundangan dan peraturan mengenai penambangan Galian C; (2) perundangan dan peraturan belum sepenuhnya dipahami oleh instansi pelaksana, terutama di tingkat daerah; (3) perubahan SOT di tingkat kabupaten berpengaruh terhadap manajemen kerja seperti kurangnya koordinasi dan sinkronisasi; (4) proses perizinan yang rumit menjadikan nilai ekonomis sirtu berkurang atau hilang sehingga pekerja memilih beroperasi tanpa izin; (5) upaya tindakan nyata pada penambangan sirtu hanya sampai pada sosialisasi peraturan dan pelarangan; (6) belum ada tindakan tegas dari pemerintah bagi yang melanggar peraturan penambangan sirtu; dan (7) pemerintah belum mampu memberi alternatif lapangan pekerjaan pengganti penambangan sirtu.

Otonomi daerah yang diharapkan dapat mengefektifkan perundangan dan peraturan pusat-daerah dalam prakteknya di lapangan tidak terkoordinasi dengan baik dan bahkan kadang-kadang masing-masing merasa memiliki hak untuk mengeluarkan izin atau keputusan. Kondisi tersebut dapat dinilai sebagai belum sepenuhnya dipahami oleh instansi pelaksana perundangan dan peraturan tentang pengelolaan sumberdaya mineral terutama di tingkat kabupaten. Salah satu penyebabnya adalah perubahan SOT.

Merujuk pada alur perizinan dan syarat-syarat perizinan yang sangat banyak membuat biaya mengurus izin sangat besar. Hal tersebut menjadikan nilai ekonomis Galian C atau sirtu berkurang atau hilang sehingga pengusaha memilih beroperasi tanpa izin dan bila dilakukan pemeriksaan maka berdalih bahwa penambangan yang terjadi adalah penambangan rakyat.

Upaya tindakan nyata dari pemerintah Kabupaten Pekalongan pada penambangan sirtu hanya sampai pada sosialisasi peraturan dan pelarangan. Artinya, membiarkan kegiatan penambangan sirtu berlangsung tanpa izin karena belum mampu memberi alternatif lapangan pekerjaan lain.

Pendukung kegiatan penambangan sirtu berasal dari semua yang terlibat dalam penam-

bang sirtu beserta keluarga dan para pembelinya. Penentang berasal dari anggota masyarakat yang rumahnya di pinggir jalan, pengguna jalan dan sebagian kecil anggota masyarakat yang mengerti tentang lingkungan hidup. Dampak negatif penambangan sirtu terhadap pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup merupakan disfungsi atau fungsi laten.

Berdasar pendekatan teori fungsional yang dikemukakan oleh Robert K Merton, fungsi manifes ditunjukkan oleh terbentuknya peluang kerja dan jaringan kompetensi kerja hingga terbentuk mata rantai kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi laten sebagai disfungsi muncul dalam bentuk dampak negatif penambangan sirtu. Henslin meneguhkan pendapat dengan menyatakan bahwa jika bagian-bagian masyarakat bekerja dengan benar, masing-masing bagian akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan kestabilan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut. (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi beralihnya petani menjadi pekerja tambang galian sirtu berasal dari dalam dan luar masyarakat Desa Krompeng. (2) Faktor dari dalam berupa usaha untuk mendapat penghasilan yang tetap dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya. (3) Faktor dari luar berupa kontak dengan masyarakat lain yang telah memiliki kegiatan penambangan sirtu. (4) Status sosial dan peran sosial pekerja tambang galian sirtu sama seperti anggota masyarakat lainnya yang tidak bekerja sebagai penambang sirtu. Status sosial sebagai anggota masyarakat pedesaan dan peran yang diperjuangkan adalah menjadi anggota masyarakat yang dapat berpartisipasi aktif dalam semua segi kehidupan dan kegiatan sebagai masyarakat pedesaan. (5) Para pekerja tambang sirtu sangat kompeten dalam pekerjaannya. Perolehan pendapatan sebagai pekerja tambang galian sirtu dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tiap hari bekerja dibandingkan buruh tani yang belum tentu bekerja setiap hari. (6) Peran pemerintah daerah dalam kegiatan penambang galian sirtu hanya berupa sosialisasi dan penyalangan patindak lanjut.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis bagaimana dipaparkan di atas, maka dalam kajian ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dan di perhatikan sebagai berikut: (1) Perlu dilakukan sosialisasi yang intensif mengenai jenis-jenis pekerjaan lain sebagai diferensiasi pe-

kerja kepada masyarakat Desa Krompeng dan para pekerja tambang galian sirtu khususnya agar kelak dapat tertarik berpindah pekerjaan. (2) Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Dinas PSDA ESDM dan KLH mencari solusi untuk menangani kegiatan penambangan galian sirtu sesuai perundangan dan peraturan dengan tidak merugikan penambang. (3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penelitian ini, terutama untuk mengetahui hubungan atau perbandingan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz, Harry Azhar. 2010. "Pertanian, Pengangguran dan Kemiskinan". *Jurnal Ekonomi Rakyat*. No. 105/4 - 2010-04-07 (diunduh 18 Januari 2012)
- BPS Jawa Tengah. 2010. *Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah* No.18/04/33/Th.IV, 01 April 2010 (diunduh 18 Januari 2012)
- BPS Kab. Pekalongan. 2010. *Kecamatan Talun Dalam Angka 2010*. Wiradesa: Kerjasama BAPPEDA dan BPS Kabupaten Pekalongan.
- Daldjoeni, N. 1986. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni
- Gianneccchini, Monica., Twine, Wayne., dan Vogel, Coolen. 2007. "Land-Cover Change and Human-Environment Interactions in a Rural Cultural Landscape in South Africa". *The Geographical Journal* 03-01-2007. <http://elibrary.bigchalk.com> (diunduh 3 Januari 2012)
- Henslin, James M., 2007a. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi Jilid 1*. Terjemahan Kamanto Sunarto. Jakarta: Erlangga
- , 2007b. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi Jilid 2*. Terjemahan Kamanto Sunarto. Jakarta: Erlangga
- Horton, Paul B, dan Chester L Hunt. 1984a. *Sosiologi Jilid 1*. Terjemahan Aminudin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga
- , 1984b. *Sosiologi Jilid 2*. Terjemahan Aminudin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga
- Kim, Hyung-Jun. 2002. "Agrarian and Social Change in a Javanese Village". *Journal of Contemporary Asia* 01-01-2002. <http://elibrary.bigchalk.com> (diunduh 3 Januari 2012)
- Miles, Mathew B. & A. Michael Huberman. 1998. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Mubyarto. 1972. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: LP3ES
- , 1983. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian*. Jakarta: portal.djmbp.esdm.go.id/ (diunduh 4 Nopember 2011)
- Rustam. 2002. *Pendapatan Menurut Standar Akuntan-*

- siKeuangan No. 23. *Makalah*. FE Jurusan Akuntansi. USU digital library
- Sajogyodan Pudjiwati Sajogyo. 1991. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- , 2002. *Perubahan Social (Sketsa Teori Dan Refleksi- Metodologi Kasus Di Indonesia)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Scott, James C. 1997. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali
- , 1983. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Social*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suandra, I Wayan. 1994. *Hukum Petanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Tjondronegoro, Sediono M.P dan Wiradi, Gunawan. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta
- Tukidi. 2001. Defersifikasi Pertanian dan Pekerjaan Non-farm di Pedesaan. *Forum Ilmu Sosial*. Vol. 25 No. 1 Juni 2001 hal 18-28. FIS Unnes
- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Jakarta: portal.djmbp.esdm.go.id/.../UU11%20Thn1967 (diunduh 4 Nopember 2011)
- UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*. Jakarta: portal.djmbp.esdm.go.id (diunduh 4 Nopember 2011)
- UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: portal.djmbp.esdm.go.id (diunduh 4 Nopember 2011)